

**PEMBERDAYAAN PARA PENYANDANG TUNANETRA
MELALUI REHABILITASI BERBASIS
MASYARAKAT**

Oleh : Sari Rudiwati *)

ABSTRACT

Educational and or rehabilitation services for people with visual empairment in Indonesia are estimated not to have reached visually impaired people who have attained the age of 25 years old and live in rural areas that have never received educational and or rehabilitation services so that they are powerless in their life. It is then necessary to develop empowering programs for visually impaired people through community-based education and or rehabilitation.

In general such programs aim at an even distribution of the equal chance to get education and or rehabilitation for those living in the rural areas who are already outside school age but have never got education and or rehabilitation. The programs especially aim to create situations making it possible for everyone with visual impairment to live normally their whole life and have a self confidence and a feeling of being close neighbors with other people; to help the family, neighbors, and other members of the community to accept, appreciate, and comfortably give assistance if necessary to the people with visual impairment in their life; and to give an equal chance and appreciate the abilities and all the potentials that the visually impaired people have.

The advantages of the empowering programs for people with visual impairment are that the programs are simple, inexpensive, and

*) Penulis adalah dosen FIP Universitas Negeri Yogyakarta

very realistic; they serve these people in their own society based on their potentials and individual needs; and the family and other community members are involved in the implementation process of the education and or rehabilitation of people with visual impairment.

Key Words : empowering, community-based education/rehabilitation, people with visual impairment

PENDAHULUAN

Penyandang tunanetra adalah seseorang yang kondisi diri penglihatannya tidak berfungsi sebagaimana mestinya, karena mengalami kerusakan pada mata, syaraf optik dan atau bagian otak yang mengolah stimulus visual. Seperti dinyatakan oleh FH. Sasraningrat bahwa :

“Tunanetra ialah kondisi dari dria penglihat yang tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Kondisi itu disebabkan oleh kerusakan pada mata, syaraf optik dan atau bagian otak yang mengolah stimulus visual” (1981 : 169).

Kondisi kerusakan tersebut dapat dialami oleh seseorang baik secara total maupun sebagian. Apabila seseorang mengalami kerusakan total pada mata, syaraf optik atau bagian otak yang mengolah stimulus visual, mereka disebut penyandang tunanetra buta total *“totally blind”*; dan apabila seseorang mengalami kerusakan sebagian pada organ tersebut, maka yang bersangkutan disebut penyandang tunanetra kurang-lihat atau lemah-penglihatan *“low visioned”*.

Sampai saat ini masih ada persepsi masyarakat bahwa jika seseorang mengalami ketunanetraan maka yang bersangkutan akan kehilangan seluruh kemampuannya, sehingga yang bersangkutan tidak berdaya dan atau tidak mampu berbuat apa-apa. Persepsi ini tidak seluruhnya benar, karena para penyandang tunanetra masih mempunyai potensi yang dapat dikembangkan, walaupun tidak dapat disangkal lagi bahwa mereka mengalami kerusakan pada diri penglihat sehingga penglihatannya tidak berfungsi sebagaimana mestinya.

Ketunanetraan akan membawa akibat timbulnya beberapa keterbatasan bagi para penyandangannya, seperti dinyatakan oleh Lowenfeld (1981: 68), bahwa : "*blindness imposes basic limitation on the individual: 1. In the range and variety of experiences, 2. In the ability to get about, 3. In the control of environment and the self in relation to it.*" Semua keterbatasan itu berhubungan dengan orientasi dan mobilitas penyandang tunanetra yang dapat dikurangi atau dikompensasikan dengan cara pemberdayaan mereka melalui pendidikan dan atau rehabilitasi. Pemberdayaan dalam hal ini adalah tindakan membuat seseorang termasuk para penyandang tunanetra berdaya atau mempunyai kekuatan, karena yang bersangkutan mempunyai kemampuan. Kemampuan tersebut dapat dimiliki seseorang melalui pendidikan dan atau rehabilitasi.

Menurut perkiraan Organisasi Kesehatan Dunia "*The World Health Organization*" bahwa satu persen dari penduduk dunia ketiga mengalami ketunanetraan (Horton, 1986 :ix). Jadi dapat diperkirakan bahwa Indonesia yang berpenduduk kurang lebih 210 juta jiwa, memiliki sekitar 2,1 juta orang penduduk yang menyandang tunanetra.

Sampai saat ini pelayanan pendidikan dan atau rehabilitasi bagi para penyandang tunanetra di Indonesia, baik dalam bentuk sekolah-sekolah khusus, sekolah-sekolah dasar luar biasa, sekolah-sekolah terpadu, maupun panti-panti rehabilitasi/sosial diperkirakan baru dapat menjangkau kurang dari satu persen penduduk yang menyandang tunanetra (Horton : 1986). Selain itu pelayanan pendidikan dan atau rehabilitasi tersebut telah dirancang untuk para penyandang tunanetra yang berusia muda dan dalam situasi perkotaan. Padahal masih banyak para penyandang tunanetra yang berusia lebih dari 25 tahun yang tinggal di daerah pedesaan belum terjangkau oleh layanan pendidikan dan atau rehabilitasi (Hornton : 1986), sehingga mereka belum berdaya dalam kehidupan mereka.

Berdasarkan permasalahan tersebut di atas maka perlu dikembangkan program pemberdayaan para penyandang tunanetra melalui pendidikan dan atau rehabilitasi bersumberdaya masyarakat. Program pendidikan dan atau rehabilitasi berbasis masyarakat bermaksud memberdayakan para penyandang tunanetra dengan menggunakan sumberdaya para anggota masyarakat sebagai petugas lapangan yang secara sukarela memberikan pelatihan bagi para penyandang tunanetra yang belum pernah memperoleh pelayanan pendidikan dan atau rehabilitasi.

Pelayanan yang diberikan kepada para penyandang tunanetra adalah pendidikan dasar dan ketrampilan hidup dalam masyarakat mereka sendiri. Para petugas lapangan bersangkutan sebelumnya juga mendapat pelatihan yang meliputi pengetahuan tentang ketunetraaan, membaca dan menulis Braille tingkat dasar dan orientasi dan mobilitas, prinsip-prinsip dasar ortodidaktik

penyandang tunanetra, dan ketrampilan-ketrampilan lain sesuai dengan kebutuhan para penyandang tunanetra setempat.

Tujuan umum program pendidikan dan atau rehabilitasi berbasis masyarakat tersebut adalah pemerataan kesempatan memperoleh layanan pendidikan dan atau rehabilitasi bagi para penyandang tunanetra, terutama bagi mereka yang telah ada di luar usia sekolah tetapi belum pernah mendapatkan layanan pendidikan dan atau rehabilitasi, serta tinggal di daerah pedesaan.

Tujuan khusus program pendidikan dan atau rehabilitasi berbasis masyarakat adalah : Menciptakan situasi yang memungkinkan setiap penyandang tunanetra hidup wajar, sedapat mungkin dalam seluruh kehidupan, mempunyai percaya diri dan kedekatan dengan orang lain; Membantu keluarga, tetangga, dan anggota masyarakat lainnya untuk menerima, menghargai dan senang memberi bantuan jika diperlukan; menerima para penyandang tunanetra dalam kehidupan mereka; memberikan kesempatan yang sama, menghargai kemampuan dan segala kemungkinan yang dimiliki oleh para penyandang tunanetra.

MANFAAT PROGRAM

Manfaat program pendidikan dan atau rehabilitasi berbasis masyarakat adalah sebagai berikut :

1. Pemerataan memperoleh layanan pendidikan dan atau rehabilitasi. Para penyandang tunanetra yang sudah tidak termasuk usia sekolah, terutama yang tinggal di daerah pedesaan, dan belum pernah memperoleh layanan pendidikan dan atau rehabilitasi akan

dapat memperoleh kesempatan layanan pendidikan dan atau rehabilitasi, sehingga mereka akan berdaya dalam kehidupan mereka.

2. Peningkatan kesadaran masyarakat tentang keberadaan dan kemampuan para penyandang tunanetra. Para anggota masyarakat, termasuk para orangtua dan atau keluarga mempunyai kesadaran tentang keberadaan dan kemampuan para penyandang tunanetra, sehingga dengan sukarela mereka turut terlibat dalam usaha pemberdayaan para penyandang tunanetra melalui program pendidikan dan atau rehabilitasi berbasis masyarakat.

KEUNGGULAN DAN HAMBATAN PROGRAM

Program pendidikan dan atau rehabilitasi berbasis masyarakat mempunyai keunggulan-keunggulan sebagai berikut : program sederhana dan sangat realistik sehingga mudah dilaksanakan; melayani para penyandang tunanetra dalam masyarakatnya sendiri sesuai dengan potensi dan kebutuhan individual; menyadarkan dan melatih para petugas lapangan lokal termasuk para orangtua dan anggota keluarga untuk menggunakan keterampilannya dalam mendidik dan atau merehabilitasi para penyandang tunanetra setempat; keluarga dan masyarakat aktif terlibat dalam proses pelaksanaan pendidikan dan atau rehabilitasi; biaya pelaksanaan program relatif ringan dan dapat ditanggung bersama antara keluarga dan masyarakat, walaupun tidak menutup kemungkinan untuk menerima bantuan dari para penyandang dana dan atau pemerintah setempat.

Hambatan yang paling sulit diatasi dalam program ini adalah dalam menghadapi sikap negatif keluarga dan masyarakat tentang para penyandang tunanetra. Keluarga dan masyarakat pada umumnya menunjukkan sikap yang tidak menguntungkan para penyandang tunanetra. Kurangnya pengetahuan dan pengertian tentang ketunanetraan menjadi penyebab utama dari sikap tersebut, jadi bukan karena masyarakat memiliki etika yang buruk terhadap para penyandang tunanetra. Seperti halnya dengan masyarakat pada umumnya, keluarga yang mempunyai anggota yang menyandang tunanetra biasanya juga menunjukkan sikap yang merugikan para penyandang tunanetra bersangkutan. Hal ini biasanya juga disebabkan karena kurang tahu atau kurang mengerti, selain itu juga masih ditambah dengan adanya tekanan batin dan emosi dari keluarga bersangkutan. Sikap atau tindakan yang tidak menguntungkan bagi para penyandang tunanetra itu antara lain adalah : tidak percaya atau mengelak kenyataan bahwa yang bersangkutan menyandang tunanetra; menolak kehadiran penyandang tunanetra, baik secara terang-terangan ataupun terselubung; dan atau melindungi secara berlebihan. Bukan rahasia lagi bahwa orang-orang awas memiliki sikap dan pandangan yang berbeda-beda terhadap ketunanetraan dan para penyandangannya. Seperti dinyatakan oleh FH. Sasraningrat dan Sumarno (1984: 44) bahwa :

"Sommer membedakan lima pola reaksi orangtua terhadap anak yang cacat :

- A. Sikap menerima anak beserta kecacadannya
- B. Sikap mengelak dan memungkiri terhadap akibat-akibat kecacadan anak.

- C. Sikap melindungi yang berlebihan terhadap anak
- D. Sikap menolak yang terselubung
- E. Sikap menolak yang terbuka.”

Pola sikap orangtua tersebut dapat diperluas menjadi sikap orang-orang awas atau masyarakat pada umumnya. Ada pengaruh positif terhadap para penyandang tunanetra dari sikap menerima penyandang tunanetra beserta kecacatannya dan sikap mengelak atau memungkiri terhadap kecacadan penyandang tunanetra. Selain itu sikap melindungi berlebihan dan sikap menolak baik yang terselubung maupun yang terbuka pada umumnya mempunyai pengaruh yang kurang positif terhadap para penyandang tunanetra.

Berkembangnya pandangan dan atau sikap negatif masyarakat terhadap para penyandang tunanetra, akan dapat menimbulkan perlakuan diskriminatif terhadap mereka. Banyak kasus yang membuktikan bahwa dalam masyarakat masih banyak perlakuan diskriminatif terhadap para penyandang tunanetra untuk memperoleh kesempatan setara dengan warga negara lain.

Selain sikap negatif keluarga dan masyarakat terhadap para penyandang tunanetra, sikap negatif para penyandang tunanetra itu sendiri juga menjadi hambatan yang paling berat di dalam melaksanakan program rehabilitasi berbasis masyarakat. Ketunanetraan dapat berarti cacat, ketidakmampuan visual dan menimbulkan berbagai keterbatasan bagi penyandangannya. Memang hal ini tidak mengubah kondisi psikik penyandang tunanetra bersangkutan, akan tetapi mempunyai implikasi terhadap perkembangan kepribadiannya. Jika penyandang tunanetra bersangkutan telah dapat menemukan jati dirinya sebagai penyandang

tunanetra atau mempunyai "*self realization*", maka baik cacat, ketidakmampuan dan keterbatasan-keterbatasan dimaksud tidak akan mempunyai implikasi psikologik. Namun demikian apabila penyandang tunanetra bersangkutan belum atau tidak mampu menemukan jati dirinya seperti apa adanya, maka cacat, ketidakmampuan dan keterbatasan-keterbatasan tersebut akan menimbulkan frustrasi, depresi, dan atau beban batin. Kondisi yang demikian itu berarti menimbulkan anca "*handicap*" pada diri penyandang tunanetra bersangkutan atau dengan kata lain penyandang tunanetra bersangkutan beranca atau mempunyai "*handicapped*".

Hambatan-hambatan tersebut di atas, dapat dikurangi atau bahkan dapat dihilangkan dengan program pemberdayaan yang antara lain dapat dilakukan dengan jalan penyuluhan, konsultasi maupun konseling, dan pelatihan terhadap para keluarga, masyarakat dan para penyandang tunanetra bersangkutan.

PELAKSANAAN PROGRAM REHABILITASI

Tidak ada formula tertentu untuk memulai program rehabilitasi berbasis masyarakat bagi para penyandang tunanetra di pedesaan, karena hal itu tergantung pada beberapa faktor. Misalnya populasi penyandang tunanetra yang bertempat tinggal berdekatan; sikap, bakat dan minat para orangtua dan atau keluarga dari para penyandang tunanetra; sumber-sumber yang tersedia; adanya pelayanan-pelayanan yang dapat diakses oleh para penyandang tunanetra; dan lain sebagainya. Namun demikian berdasarkan pengalaman nyata penulis, program pendidikan dan atau rehabilitasi

bersumberdaya masyarakat dapat dilaksanakan dengan melibatkan para penyandang tunanetra, para orangtua dan atau keluarga penyandang tunanetra. Pelaksanaan program rehabilitasi dapat ditempuh antara lain dengan tahap-tahap sebagai berikut

1. Tahap Persiapan

a. Pembentukan Kelompok Kerja

Sebelum pelaksanaan program maka perlu dibentuk suatu kelompok kerja yang bertanggungjawab tentang pelaksanaan program pendidikan dan atau rehabilitasi bersumberdaya masyarakat. Dalam kelompok kerja ini perlu keterlibatan para anggota masyarakat secara penuh, termasuk para tokoh masyarakat, alim-ulama, para orangtua dan atau keluarga para penyandang tunanetra, para penyandang tunanetra itu sendiri, lembaga sosial masyarakat, serta para pemerhati dan para ahli di bidang pendidikan dan atau rehabilitasi para penyandang tunanetra.

b. Penyusunan Agenda Pelaksanaan Program dan Rencana Pembiayaan.

Dalam penyusunan agenda pelaksanaan program dan rencana pembiayaan pendidikan dan atau rehabilitasi juga perlu melibatkan beberapa pihak yang mempunyai kepedulian terhadap keberadaan dan kehidupan para penyandang tunanetra, antara lain para tokoh masyarakat, para ulama agama, aparat pemerintah setempat, para orangtua dan atau keluarga penyandang tunanetra, ibu-ibu anggota PKK, para pemuda, Lembaga Sosial Masyarakat yang menangani permasalahan penyandang tunanetra, para penyandang

tunanetra itu sendiri, dan jika diperlukan para penyandang dana. Agenda pelaksanaan program dan rencana pembiayaan, hendaknya dapat disusun secara realistik berdasarkan kebutuhan riil di lapangan.

c. Pengurusan Ijin Pelaksanaan Program dan Hubungan Kerjasama.

Untuk memperlancar pelaksanaan program pendidikan dan atau rehabilitasi bersumberdaya masyarakat, maka Kelompok Kerja hendaknya dapat meminta izin dan atau pemberitahuan terhadap pihak-pihak yang berkepentingan. Hal ini sekaligus untuk menjalin hubungan kerjasama dengan para tokoh masyarakat dan aparat pemerintah setempat, serta para keluarga dan para penyandang tunanetra itu sendiri.

d. Penyuluhan Massa dan Sosialisasi Program

Penyuluhan massa tentang keberadaan dan potensi para penyandang tunanetra, hak dan kewajiban mereka sebagai warga negara; serta sosialisasi program pendidikan dan atau rehabilitasi bersumberdaya masyarakat perlu dilakukan. Hal ini dimaksudkan agar para anggota masyarakat memahami tentang tujuan program tersebut, sehingga mereka dapat ikut berpartisipasi secara aktif dalam program.

Penyuluhan massa dan sosialisasi program dapat dilakukan dalam forum pertemuan ibu-ibu PKK, pertemuan para pemuda, maupun pertemuan para tokoh masyarakat dan para pamong desa setempat. Metode penyuluhan dapat berupa ceramah dan tanya jawab, diskusi atau seminar, maupun melalui media cetak dan atau media audio visual. Dalam penyuluhan dan sosialisasi program ini dapat ditampilkan figur

tokoh penyandang tunanetra yang telah berhasil dalam kehidupannya. Hal ini untuk meyakinkan para anggota masyarakat termasuk juga para orang tua dan atau keluarga para penyandang tunanetra bahwa seorang penyandang tunanetra juga mempunyai kemampuan yang dapat dikembangkan, sehingga mencapai kemandirian di dalam kehidupannya.

e. *Survai dan Penjaringan Para Penyandang Tunanetra*

Survai dan penjaringan para penyandang tunanetra perlu dilakukan untuk mengetahui populasi penyandang tunanetra yang ada di daerah setempat, dan agar dapat membuat keputusan berapa jumlah penyandang tunanetra yang akan dilayani dalam program pendidikan dan atau rehabilitasi dimaksud. Tenaga survai dan penjaringan dapat direkrut dari ibu-ibu anggota PKK, para pemuda, dan para pelajar atau mahasiswa yang sedang melaksanakan praktek kerja dan atau kuliah kerja nyata di daerah tersebut. Sebelum terjun ke lapangan para tenaga survai dan penyaringan perlu dibekali dengan pengetahuan tentang ketunanetraan dan teknik-teknik survai dan penyaringan penyandang tunanetra.

f. *Studi Kelayakan dan Penetapan Tempat Pelaksanaan Program.*

Setiap daerah mempunyai kondisi dan situasi yang berbeda satu dengan yang lain, termasuk dalam hal ini mempunyai populasi penyandang tunanetra yang sudah tidak termasuk dalam kategori usia sekolah, tetapi belum pernah memperoleh

kesempatan layanan pendidikan dan atau rehabilitasi. Oleh karena itu berdasarkan hasil survai dan penjarangan para penyandang tunanetra, perlu dilanjutkan dengan studi kelayakan dan penetapan tempat pelaksanaan program pendidikan dan atau rehabilitasi berbasis masyarakat.

Dalam studi kelayakan dan penetapan tempat pelaksanaan program perlu ditentukan suatu kriteria tertentu tentang layak tidaknya suatu daerah dijadikan tempat pelaksanaan program pendidikan dan atau rehabilitasi. Misalnya saja di suatu desa harus ada minimal sepuluh orang penyandang tunanetra yang sudah melebihi usia sekolah tetapi belum pernah memperoleh layanan pendidikan dan atau rehabilitasi. Selain itu di desa tersebut terdapat banyak sumberdaya masyarakat dan fasilitas yang dapat diakses dalam pelaksanaan program pendidikan dan atau rehabilitasi. Berdasarkan kriteria tersebut, maka dapat ditetapkan daerah atau desa mana yang memenuhi syarat untuk digunakan sebagai tempat pelaksanaan program pendidikan dan atau rehabilitasi dimaksud.

g. *Pelatihan Para Calon Tenaga Pelaksana Program*

Para calon tenaga pelaksana program pendidikan dan atau rehabilitasi berbasis masyarakat perlu mendapat pelatihan tentang hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan program. Materi pelatihan tersebut antara lain adalah pengetahuan tentang ketunanetraan; keterampilan membaca dan menulis Braille tingkat dasar serta orientasi dan mobilitas; keterampilan kegiatan kehidupan sehari-hari penyandang

tunanetra; prinsip-prinsip dasar ortodidaktik penyandang tunanetra; dan keterampilan-keterampilan lain sesuai dengan kebutuhan para penyandang tunanetra setempat. Waktu pelatihan dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi desa setempat, namun demikian jangka waktu pelatihan dilaksanakan minimal selama dua minggu.

h. Pengadaan peralatan, bahan, dan perlengkapan.

Peralatan, bahan dan perlengkapan yang digunakan dalam pelatihan maupun dalam pelaksanaan program pendidikan dan atau rehabilitasi perlu diadakan sesuai dengan kebutuhan. Peralatan, bahan, dan perlengkapan mana yang perlu diadakan sebelum pelatihan dan mana yang perlu diadakan setelah pelatihan selesai, perlu direncanakan secara matang, agar lebih efektif dan efisien. Peralatan, bahan dan perlengkapan mana yang perlu dibeli dan mana yang tidak. Hal ini karena ada pertimbangan bahwa ada pihak-pihak tertentu yang sudah menyediakan diri untuk membantu dan atau menyumbang peralatan, bahan, dan perlengkapan dimaksud. Dengan demikian anggaran biaya program dapat dikurangi.

2. Tahap Pelaksanaan Program

Setelah tahap persiapan selesai dilakukan, maka seterusnya dilaksanakan program pendidikan dan atau rehabilitasi terhadap para penyandang tunanetra dengan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

a. Layanan Pendidikan dan atau Rehabilitasi Keterampilan Dasar

Layanan pendidikan dan atau rehabilitasi keterampilan dasar bertujuan agar para penyandang tunanetra yang belum pernah memperoleh layanan pendidikan dan atau rehabilitasi mempunyai keterampilan dasar untuk bekal kehidupan sehari-hari. Materi layanan pendidikan dan atau rehabilitasi keterampilan dasar tersebut antara lain adalah sebagai berikut:

- 1) Membaca dan menulis Braille tingkat dasar
- 2) Orientasi dan mobilitas
- 3) Keterampilan Kehidupan sehari-hari.
- 4) Matematika tingkat dasar.

b. Layanan Pendidikan dan atau Rehabilitasi Vokasional

Layanan pendidikan dan atau rehabilitasi vokasional bertujuan agar para penyandang tunanetra yang telah mengikuti layanan pendidikan dan atau rehabilitasi keterampilan tingkat dasar dapat memperoleh tambahan keterampilan yang dapat memberikan bekal untuk mencari nafkah. Materi layanan pendidikan dan atau rehabilitasi vokasional ini diberikan berdasarkan minat, bakat, kondisi dan sumber-sumber yang ada di tempat atau di desa yang bersangkutan. Misalnya keterampilan kerajinan acaman. Bahan acaman hendaknya dipilih yang banyak terdapat di tempat itu; seperti misalnya bambu, rotan, enceng-gondhok, mendhong, pandan, dan lain sebagainya.

c. Pemberian Modal Kegiatan Usaha.

Setelah para penyandang tunanetra selesai mengikuti layanan pendidikan dan atau rehabilitasi keterampilan dasar dan

vokasional, maka idealnya bagi para penyandang tunanetra yang tidak mampu dapat diusahakan untuk memperoleh modal kegiatan usaha. Modal Kegiatan usaha tersebut dapat diusahakan lewat swadaya masyarakat, misalnya dengan "*jimpitan beras*" yang hasilnya dapat dijual untuk modal kegiatan usaha; atau gerakan "*piring terbang*" artinya para anggota masyarakat diminta sumbangan sukarela untuk membantu warganya yang membutuhkan bantuan modal kegiatan usaha yang kebetulan warga tersebut menyandang tunanetra.

Selain hal tersebut di atas juga dapat dicarikan dukungan dana dari pemerintah maupun para penyandang dana atau lembaga sosial kemasyarakatan yang peduli terhadap layanan pendidikan rehabilitasi para penyandang tunanetra.

d. Supervisi dan Evaluasi Kegiatan/Program

Supervisi dan evaluasi kegiatan/program pendidikan dan atau rehabilitasi dapat dilakukan langsung oleh para pelaksana program/petugas lapangan dan secara periodik oleh Kelompok Kerja Program Pendidikan dan atau Rehabilitasi maupun para warga masyarakat yang ditugaskan untuk itu.

Evaluasi terhadap para penyandang tunanetra yang mengikuti program pendidikan rehabilitasi dilaksanakan sebelum dan sesudah program pendidikan dilaksanakan.

Hasil supervisi dan evaluasi kegiatan/program perlu dibahas dalam suatu forum yang diadakan oleh Kelompok Kerja Pendidikan dan atau Rehabilitasi dengan mengundang para

warga masyarakat untuk mengadakan analisis tentang hasil supervisi dan evaluasi kegiatan/program pendidikan dan atau rehabilitasi. Dalam forum tersebut dapat dibahas permasalahan-permasalahan yang menyangkut pelaksanaan program pendidikan rehabilitasi beserta solusinya. Antara lain adalah : Apakah program pendidikan dan atau rehabilitasi dapat mencapai tujuan yang diharapkan?; Apakah kendala-kendala pelaksanaan program dapat diatasi? Bagaimana manfaat program bagi para penyandang tunanetra beserta keluarga, dan masyarakat sekitarnya?

3. Tahap Tindak Lanjut

Setelah selesai dilaksanakan program pendidikan rehabilitasi berbasis masyarakat, maka seterusnya dapat dilaksanakan program tindak lanjut, antara lain sebagai berikut :

a. Pelatihan Kewirausahaan.

Untuk menumbuhkan jiwa kewirausahaan, maka perlu diberikan pelatihan mengenai kewirausahaan bagi para penyandang tunanetra yang telah berhasil mengikuti layanan pendidikan dan atau rehabilitasi keterampilan dasar dan keterampilan vokasional. Materi yang disampaikan dalam pelatihan ini termasuk juga keterampilan pemasaran hasil produksi dari para penyandang tunanetra binaan.

b. Pendampingan para Penyandang Tunanetra Dalam Berwirausaha.

Setelah para penyandang tunanetra memperoleh pelatihan kewirausahaan, mereka masih memerlukan pendampingan di

dalam berwirausaha, terutama dalam hal pemasaran hasil produksi, dan menjalin hubungan dengan pihak-pihak yang berkepentingan untuk menjaga kelangsungan hidup usaha mereka.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa sampai saat ini pelayanan pendidikan para penyandang tunanetra di Indonesia baik dalam sekolah-sekolah khusus/SLB, Sekolah Dasar Khusus/ SDLB, sekolah-sekolah terpadu maupun panti-panti sosial/rehabilitasi masih belum menjangkau para penyandang tunanetra yang telah berusia lebih dari 25 tahun dan tinggal di daerah pedesaan. Dengan demikian penyandang tunanetra tersebut belum berdaya dalam kehidupan mereka.
2. Bahwa berdasarkan kenyataan tersebut di atas, maka perlu dikembangkan program pemberdayaan para penyandang tunanetra melalui pendidikan dan atau rehabilitasi bersumberdaya masyarakat. Hal ini disebabkan karena program pendidikan dan atau rehabilitasi bersumberdaya masyarakat merupakan program yang sederhana dan sangat realistik sehingga mudah dilaksanakan dengan biaya yang murah. Selain itu program ini dapat melayani para penyandang tunanetra beserta keluarganya dalam masyarakatnya sendiri, sesuai dengan potensi dan kebutuhan individual mereka.

3. Bahwa program pendidikan rehabilitasi berbasis masyarakat bermaksud memberdayakan para penyandang tunanetra dengan menggunakan sumberdaya para anggota masyarakat, termasuk para orangtua dan atau keluarga dan para penyandang tunanetra itu sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

- Baraga, Natalie, C. (1978). *Pengembangan Penggunaan Sisa Penglihatan*. Jakarta : Depertemen Pendidikan dan Kebudayaan RI.
- Busono, Mardiaty. (1988). *Pendidikan Anak Kuranglihat*. Jakarta : Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI.
- Horton, J.Kirk. (1986). *Community-Based Rehabilitation of the Rural Blind*. (A training Guide for Field Workers). New York, USA: Helen Keller International Incorporated.
- Sasraningrat F. Harsana. (1981). *Metodik Khusus Anak Tunanetra*. Yogyakarta: Federasi Kesejahteraan Tunanetra Indonesia.
- _____, dan Sumarno. (1984). *Ortodidaktik Anak Tunanetra*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI.
- Scholl, Geraldine. (1988). *Foundation of Education for the Visually Impaired Children and Youth*. New York, USA : American Foundation of the Blind, Incorporated.
- Yusuf, Munawir. (1996). *Pendidikan Tunanetra Dewasa dan Pembinaan Karir*. Jakarta: Proyek Pendidikan Tenaga Akademik, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI.

Werner, David. (1987). *Disabled Villager Children*. (A Guide for Community Health workers, rehabilitation workers, and families. Palo Alto, CA 94302, USA : The Hesperian Foundation.